

## KEMAMPUAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN SILPA PADA IPM

I Putu Adita Wahyu<sup>1</sup>  
A.A.N.B Dwirandra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: agoes\_adita@yahoo.com / telp: +62 85 881 22 07 36

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Variabel independen seperti PAD, DAU, DAK, dan SiLPA tidak selalu berpengaruh linier pada IPM, dikarenakan adanya faktor kontinjensi yang mempengaruhi hubungan tersebut. Salah satu faktor kontinjensi tersebut adalah belanja modal. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA pada IPM, serta pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA dengan moderasi belanja modal pada IPM. Penelitian mencakup satu kota dan delapan kabupaten di Provinsi Bali dalam rentang waktu amatan 2008-2013. Lokasi dari penelitian ini yaitu Kantor Biro Keuangan Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali. Hasil pengujian menunjukkan PAD, DAK, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada IPM sedangkan DAU tidak berpengaruh pada IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel moderasi (belanja modal) mampu memoderasi variabel DAU, DAK, dan SiLPA namun tidak mampu memoderasi variabel PAD pada IPM.

**Kata Kunci:** PAD, DAU, DAK SiLPA, Belanja Modal, IPM

### ABSTRACT

*Independent variables such as PAD, DAU, DAK, and SiLPA allegedly not always have linear effect to HDI, due to contingent factors that influence the relationship. One of the contingency factor is capital expenditure. This study has pupose to determine the effect of PAD, DAU, DAK, and SiLPA on HDI, as well as the effect of PAD, DAU, DAK, and SiLPA with moderation of capital expenditure on HDI. Research includes eight districts and one city of Bali in a span of observations from 2008 to 2013. The location of this study, namely the Provincial Finance Bureau Office of Bali and the Bali Provincial Statistics. The test results showed PAD, DAK, and SiLPA have positive and significant effect on HDI while DAU has no effect on HDI in the District / City in Bali Province. Moderating variables (capital expenditure) capable of moderating variable DAU, DAK, and SiLPA but not able to moderate variable PAD on HDI.*

**Keywords:** PAD, DAU, DAK SiLPA, Capital Expenditure, HDI

### PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, mencatat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali hingga 2013 adalah sebesar 74,11. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,62 dari tahun 2012, dimana Provinsi Bali memperoleh nilai IPM sebesar 73,49. Namun jika dilihat lebih seksama

peningkatan IPM Provinsi Bali cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2010, dimana peningkatan IPM Provinsi Bali tahun 2009 ke 2010 sebesar 0,76 sedangkan peningkatan IPM Provinsi Bali tahun 2012 ke 2013 sebesar 0,62. Selain itu jika dibandingkan dari tahun ke tahun, peningkatan IPM Provinsi Bali juga tidak konsisten.

IPM merupakan sebuah indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, berketerampilan serta mempunyai pendapatan untuk layak hidup (BPS, 2012:18) Peningkatan kualitas manusia pada suatu wilayah melalui pembangunan manusia memiliki kontribusi yang besar untuk menentukan keberhasilan pembangunan dan pengelolaan di wilayahnya, karena dengan peningkatan kualitas manusia yang tercermin dari IPM diharapkan mampu menunjang pembangunan di berbagai bidang.

Upaya meningkatkan IPM tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerahnya untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang dapat menaikkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Apalagi di era desentralisasi seperti sekarang ini, adanya pelimpahan wewenang dalam mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya dari pemerintah pusat kepada daerah otonom (UU Nomor 32 Tahun 2004), mengindikasikan bawah pemerintah daerah diharapkan mampu menggali serta memanfaatkan sumber daya daerah masing-masing dan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi memiliki banyak manfaat yang dapat diberikan untuk pemerintah daerah. Seperti yang dinyatakan Sasana (2009) dan Jumadi *et al.* (2013) yang mengatakan bahwa manfaat desentralisasi fiskal adalah untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi dalam penyediaan layanan publik, peningkatan akuntabilitas, transparansi dan peningkatan mobilitas dana. Selain itu, manfaat lain dari desentralisasi fiskal adalah mendorong pemerintah daerah untuk menjadi inovatif dan memiliki akuntabilitas bagi warga dan penduduknya. Hal ini didukung oleh Tiebout (1956) yang mengemukakan dimensi kompetisi antar daerah serta dimensi persaingan dalam pemerintah tentang alokasi pengeluaran publik. Desentralisasi fiskal juga dapat membuat penerimaan daerah menjadi lebih baik.

Membbaiknya penerimaan daerah akan berkontribusi pada meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, membuat daerah mampu membiayai dan memenuhi keperluan yang diharapkan masyarakat (Christy dan Adi, 2009). Meningkatnya PAD, DAU, DAK, dan SiLPA memungkinkan adanya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM jika dana tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi (otonomi daerah) adalah Penerimaan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Setyowati dan Suparwati, 2012). Tingkat dari kemandirian

suatu daerah terlihat dari seberapa besar PAD yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri berarti pendapatan asli daerah tersebut akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri. PAD yang merupakan penerimaan daerah diharapkan mampu menambah investasi belanja modal agar terjadi perbaikan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat.

Penerapan desentralisasi fiskal memberikan konsekuensi-konsekuensi, dimana daerah dituntut mampu membiayai pengeluaran daerah menggunakan PAD tetapi tidak semua daerah mampu melakukan hal tersebut. Ini menyebabkan pembangunan di setiap daerah tidak merata. Mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Perimbangan. Dana tersebut berasal dari APBN yang diperuntukkan membiayai keperluan daerah. Dana Perimbangan tersebut misalnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAU yang bersumber dari pusat merupakan pengalokasian dana dengan tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah bisa memberikan masyarakat pelayanan lebih baik dengan dana ini sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang (Harahap, 2010). Selain DAU, terdapat juga DAK yang berperan untuk pembangunan sarana dana prasarana pelayanan daerah (Fauzyny, 2013). Penggunaan DAK diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, perbaikan

dan peningkatan sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomis yang panjang (Ardhani, 2011). Pemanfaatan serta penggunaan DAK menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah (Usaman dkk, 2008). Pengelolaan DAK yang dilakukan dengan baik, akan mampu memperbaiki pelayanan kesehatan, mutu pendidikan serta mengurangi kerusakan infrastruktur.

Sumber pendanaan daerah lainnya dalam rangka penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). SiLPA adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah bila SiLPA tersebut terbentuk dari surplus APBD dan terjadi pembiayaan neto positif, yaitu komponen pengeluaran pembiayaan lebih kecil dari komponen penerimaan (Balitbangda NTT, 2008). Timbulnya SiLPA yang berasal atau terbentuk dari pelampauan target penerimaan daerah sangat diharapkan sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam mendukung pembangunan daerah. Dimana tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Diberlakukannya desentralisasi fiskal seperti saat ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan di banyak sektor utamanya pada sektor publik. Pembangunan infrastruktur pada sektor publik merupakan salah satu upaya meningkatkan fasilitas publik agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Christy dan Adi (2009) menyatakan untuk meningkatkan kemajuan daerah dan

mensejahterakan masyarakat daerah diperlukan pengalokasian dana belanja modal yang lebih besar seperti sarana dan prasarana serta pembangunan gedung yang memadai. Perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana penunjang lainnya serta peningkatan sarana dan prasarana publik daerah akan meningkatkan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan (Bati, 2009). Hal tersebut tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setyowati dan Suparwati (2012) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa PAD, DAU, dan DAK terbukti berpengaruh positif pada IPM melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Lugastoro (2013) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif signifikan pada IPM tetapi DAU berpengaruh negatif signifikan pada IPM. Harahap (2010) dalam penelitiannya menemukan hasil yaitu, secara parsial DAU dan DAK tidak berpengaruh pada IPM. Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa PAD berpengaruh positif signifikan pada IPM, DAU berpengaruh negatif tidak signifikan pada IPM, dan DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu serta dugaan peningkatan PAD, DAK, DAU dan SiLPA tidak selalu meningkatkan IPM memotivasi penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi dan menjadikan PAD, DAU, DAK dan SiLPA sebagai variabel bebas, serta penelitian dilakukan mengkhusus di Provinsi Bali.

Teori yang menjelaskan mengenai bagaimana hubungan desentralisasi dengan pelayanan publik, perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat adalah

teori federalisme fiskal (Martini, 2014). Rindayati (2009), Yusuf (2014), dan Smoke (2001) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pusat atau nasional kepada daerah atau lokal dan kewenangan daerah mengurus serta mengatur kepentingannya sesuai dengan keputusannya sebagai daerah otonom.

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan agen sebagai sebuah kontrak dimana agen disewa oleh satu atau lebih (prinsipal) untuk melakukan jasa yang berhubungan dengan kepentingan mereka dengan melimpahkan beberapa wewenang dalam membuat keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Yudhaningsih (2010) mengatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan pada sektor publik. Yudhaningsih (2010) menyatakan adanya desentralisasi fiskal, berarti ada delegasi dari pusat kepada daerah dimana daerah mengeksekusi fungsi-fungsi pemerintah pusat yang telah didelegasikan kepadanya atau dengan kata lain pemerintah daerah bertindak sebagai agen pemerintah pusat.

Perbedaan hasil penelitian satu peneliti dengan lainnya dapat terjadi karena beberapa faktor lain yang diduga juga memiliki pengaruh antara PAD, DAU, dan DAK pada IPM. Perbedaan hasil dari penelitian tersebut, menyebabkan penggunaan pendekatan kontinjensi. Pada penelitian ini ditambahkan variabel moderasi belanja modal yang diduga memiliki pengaruh antara PAD, DAU, dan DAK pada IPM.

Rumusan hipotesis penelitian berdasarkan latar belakang dan teori di atas yaitu:

H<sub>1</sub> : PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Provinsi Bali

- H<sub>2</sub> : DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Provinsi Bali.
- H<sub>3</sub> : DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Provinsi Bali.
- H<sub>4</sub> : SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Provinsi Bali.
- H<sub>5</sub> : Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Provinsi Bali.
- H<sub>6</sub> : Belanja modal memoderasi pengaruh PAD dengan IPM
- H<sub>7</sub> : Belanja modal memoderasi pengaruh DAU dengan IPM.
- H<sub>8</sub> : Belanja modal memoderasi pengaruh DAK dengan IPM.
- H<sub>9</sub> : Belanja modal memoderasi pengaruh SiLPA dengan IPM.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi tempat dilakukannya penelitian ini di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali serta Biro Keuangan Provinsi Bali. Ruang lingkup penelitian mencakup satu kota dan delapan kabupaten yang terdapat di Provinsi Bali. Sementara itu objek penelitian ini ialah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2008-2013 serta Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dan belanja modal pada tahun 2007-2012. Variabel-variabel penelitian meliputi PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ), SiLPA ( $X_4$ ), belanja modal ( $X_5$ ) dan IPM ( $Y$ ). Tabel Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2013 serta Laporan Realisasi APBD Tahun 2007-2013 merupakan data sekunder dalam penelitian ini. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yaitu sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang meliputi delapan kabupaten dan satu kota.



Pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipan. Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan sebagai teknik analisis data dengan program SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data panel atau *pooled data* adalah data yang digunakan pada penelitian ini, meliputi sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota periode 2008 hingga 2013 (untuk data PAD, DAU, DAK, IPM) serta periode 2007 hingga 2012 (untuk data SiLPA dan belanja modal). Jumlah data yang digunakan pada penelitian ini adalah 54 amatan (enam tahun x sembilan kabupaten/kota), setelah itu dilakukan eliminasi data outlier sehingga menjadi 48 amatan.

Sebelum model regresi digunakan untuk memprediksi agar hasil penelitian tidak bias, maka perlu menguji kelayakan model yang dibuat dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan melakukan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Normalitas**

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
N	48
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,616
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,843

*Sumber: Data Olahan SPSS, 2014*

Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada Tabel 1 sebesar  $0,843 > 0,05$ , yang menunjukkan data terdistribusi secara normal.

**Tabel 2.**  
**Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	1,723

*Sumber: Data Olahan SPSS, 2014*

Nilai Durbin-Watson pada Tabel 2 sebesar 1,723. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,723 terletak diantara dL (1,3167) dan dU (1,7725) dapat dikatakan hasil uji autokorelasinya adalah  $dL < DW < dU$  yaitu  $1,3167 < 1,723 < 1,7725$  (tidak ada keputusan). Karena uji autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson tidak memberikan keputusan, maka dilakukan *Runs Test*.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji *Runs Test***

	Unstandardized Residual
Test Value(a)	0,24164
Cases < Test Value	24
Cases $\geq$ Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	22
Z	-0,729
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,466

*Sumber: Data Olahan SPSS, 2014*

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada Tabel 3 memiliki nilai  $0,446 > 0,05$  yang berarti data penelitian tidak mengandung gejala autokorelasi.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD ( $X_1$ )	0,354	2,828
DAU ( $X_2$ )	0,593	1,686
DAK ( $X_3$ )	0,391	2,561
SiLPA ( $X_4$ )	0,508	1,970
BM ( $X_5$ )	0,558	1,792

*a. Dependent Variable: IPM*

*Sumber: Data Olahan SPSS, 2014*

Pada Tabel 4 terlihat nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,1 (10%) serta nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10. Terbukti bahwa penelitian ini tidak mempunyai gejala multikolinearitas.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	t	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	-5,97	0,554	TTH
PAD ( $X_1$ )	1,024	0,312	TTH
DAU ( $X_2$ )	-0,975	0,336	TTH
DAK ( $X_3$ )	1,816	0,077	TTH
SiLPA ( $X_4$ )	0,866	0,392	TTH
BM ( $X_5$ )	0,957	0,344	TTH
PADBM ( $X_1.X_5$ )	-1,467	0,151	TTH
DAUBM ( $X_2.X_5$ )	0,999	0,324	TTH
DAKBM ( $X_3.X_5$ )	-1,595	0,119	TTH
SiLPABM ( $X_4.X_5$ )	-1,162	0,252	TTH

TTH: Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

*Sumber: Data Olahan SPSS, 2014*

Nilai sig. dari masing-masing variabel yang ditunjukkan pada Tabel 5 adalah di atas 0,05. Ini menandakan bahwa pada penelitian ini, semua variabel dikatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Setelah melakukan uji asumsi klasik, dilanjutkan dengan uji kesesuaian model, uji koefisien determinasi dan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil dari uji tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Kesesuaian Model**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	323,210	9	35,912	10,060	0,000 <sup>a</sup>
Residual	135,651	38	3,570		
Total	458,860	47			

*Sumber: Data Olahan SPSS, 2014*

*P-value* pada Tabel 6 sebesar  $0,000 < 0,05$  berarti model penelitian ini mampu digunakan sebagai alat analisis dalam menguji pengaruh variabel bebas dan moderasi pada variabel terikat. Hal menunjukkan bahwa variabel DAU, PAD, DAK, SiLPA, belanja modal, dan pemoderasi secara serempak berpengaruh pada variabel terikatnya yaitu IPM.

**Tabel 7.**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,839 <sup>a</sup>	0,704	0,634	1,88938

*Sumber: Data Olahan SPSS, 2014*

Nilai  $R^2$  pada Tabel 7 sebesar 0,704 yang memiliki arti bahwa 70,4% variasi perubahan IPM dapat diterangkan oleh variabel DAU, PAD, DAK, SiLPA, belanja modal, dan pemoderasi. Sisanya lagi 29,6% dipengaruhi variabel lain diluar model.

**Tabel 8.**  
**Hasil Moderated Regression Analysis**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	65,887	4,755	-	13,857	0,000
PAD (X <sub>1</sub> )	0,0000210	0,0000087	1,077	2,417	0,021
DAU (X <sub>2</sub> )	-0,0000153	0,0000096	-0,596	-1,589	0,120
DAK (X <sub>3</sub> )	0,000210	0,0000796	1,011	2,632	0,012
SiLPA (X <sub>4</sub> )	0,0000502	0,0000256	0,804	1,960	0,057
BM (X <sub>5</sub> )	0,0000790	0,0000567	0,959	1,394	0,171
PADBM (X <sub>1</sub> .X <sub>5</sub> )	-0,0000000000874	0,000000000049	-0,830	-1,774	0,084
DAUBM (X <sub>2</sub> .X <sub>5</sub> )	0,000000000185	0,000000000086	1,356	2,147	0,038
DAKBM (X <sub>3</sub> .X <sub>5</sub> )	-0,00000000301	0,000000000884	-2,085	-3,405	0,002
SiLPABM (X <sub>4</sub> .X <sub>5</sub> )	-0,000000000525	0,000000000212	-1,344	-2,477	0,018
<b>R<sup>2</sup></b>					0,704
<b>F Hitung</b>					10,060
<b>Sig. F</b>					0,000

Sumber: Data Olahan SPSS, 2014

Berdasarkan *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang dilakukan, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{IPM} = & 65,887 + 0,000021 \text{ PAD} - 0,0000153 \text{ DAU} + 0,00021 \text{ DAK} + \\
 & 0,0000502 \text{ SiLPA} + 0,000079 \text{ BM} - 0,000000000087 (\text{PAD} \cdot \text{BM}) \\
 & + 0,000000000185 (\text{DAU} \cdot \text{BM}) - 0,00000000301 (\text{DAK} \cdot \text{BM}) - \\
 & 0,000000000525 (\text{SiLPA} \cdot \text{BM}) + e
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji satu sisi untuk variabel PAD sebesar 0,0105 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05 dengan nilai koefisien regresi PAD sebesar 0,000021. Penelitian ini membuktikan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM, sehingga H<sub>1</sub> diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin tinggi, maka

tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut yang diukur melalui IPM akan semakin tinggi.

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji satu sisi untuk variabel DAU sebesar 0,06 yang menunjukkan angka lebih besar daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05 dengan nilai koefisien regresi DAU sebesar -0,0000153. Penelitian ini membuktikan DAU tidak memiliki pengaruh pada IPM, sehingga  $H_2$  ditolak. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa DAU tidak memiliki kontribusi pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM.

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji satu sisi untuk variabel DAK sebesar 0,006 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05 dengan nilai koefisien regresi DAK sebesar 0,00021. Penelitian ini membuktikan DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM, sehingga  $H_3$  diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika DAK yang diterima oleh pemerintah daerah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut yang diukur melalui IPM akan semakin tinggi.

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji satu sisi untuk variabel SiLPA sebesar 0,0285 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05 dengan nilai koefisien regresi SiLPA sebesar 0,0000502. Penelitian ini membuktikan SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM, sehingga  $H_4$  diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika SiLPA pemerintah daerah semakin meningkat, maka

tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut yang diukur melalui IPM akan semakin meningkat.

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji satu sisi untuk variabel belanja modal sebesar 0,0855 yang menunjukkan angka lebih besar daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05 dengan nilai koefisien regresi BM sebesar 0,000079. Penelitian ini membuktikan belanja modal tidak memiliki pengaruh pada IPM, sehingga  $H_5$  ditolak. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa belanja modal tidak memiliki kontribusi pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM.

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji dua sisi untuk variabel pemoderasi belanja modal mempengaruhi hubungan PAD dengan IPM sebesar 0,084 yang menunjukkan angka lebih besar daripada taraf nyata sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,000000000087. Hal ini berarti belanja modal tidak memiliki pengaruh dan tidak mampu memoderasi hubungan antara PAD dengan IPM, sehingga  $H_6$  ditolak.

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji dua sisi untuk variabel pemoderasi belanja modal mempengaruhi hubungan DAU dengan IPM sebesar 0,038 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000000000185. Hal ini berarti belanja modal memiliki pengaruh dan mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan IPM, sehingga  $H_7$  diterima. Jika dilihat dari arah pengaruhnya, belanja modal memperlemah pengaruh DAU pada IPM. Hasil

penelitian ini memiliki arti semakin tinggi moderasi belanja modal, maka pengaruh DAU pada IPM akan menurun.

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji dua sisi untuk variabel pemoderasi belanja modal mempengaruhi hubungan DAK dengan IPM sebesar 0,002 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,00000000301. Hal ini berarti belanja modal memiliki pengaruh dan mampu memoderasi hubungan antara DAK dengan IPM, sehingga  $H_8$  diterima. Jika dilihat dari arah pengaruhnya, belanja modal memperlemah pengaruh DAK pada IPM. Hasil penelitian ini memiliki arti semakin tinggi moderasi belanja modal, maka pengaruh DAK pada IPM akan menurun.

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji dua sisi untuk variabel pemoderasi belanja modal mempengaruhi hubungan SiLPA dengan IPM sebesar 0,018 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,000000000525. Hal ini berarti modal memiliki pengaruh atau mampu memoderasi hubungan antara SiLPA dengan IPM, sehingga  $H_9$  diterima. Jika dilihat dari arah pengaruhnya, belanja modal memperlemah pengaruh SiLPA pada IPM. Hasil Penelitian ini memiliki arti semakin tinggi moderasi belanja modal, maka pengaruh SiLPA pada IPM akan menurun.



## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan yang dapat diambil adalah variabel PAD, DAU, DAK, SiLPA, belanja modal dan pemoderasi secara serempak memiliki pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. DAU tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi pengaruh PAD pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Belanja modal memiliki pengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan arah memperlemah hubungan DAU dengan IPM. Belanja modal memiliki pengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh DAK pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan arah memperlemah hubungan DAK dengan IPM. Belanja modal memiliki pengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh SiLPA pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan arah memperlemah hubungan SiLPA dengan IPM.

Saran yang dapat direkomendasikan adalah pemerintah daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi serta sektor-sektor ekonomi daerah yang mampu meningkatkan PAD misalnya dengan cara

intensifikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemda diharapkan mampu memanfaatkan PAD, DAU, dan SiLPA untuk membangun infrastruktur publik dan sarana penunjang lainnya yang memang diperlukan masyarakat, sehingga tidak terkesan mubasir ketika fasilitas tersebut ternyata belum dibutuhkan masyarakat. Pemda hendaknya melakukan analisis investasi publik dan studi kelayakan investasi publik sebelum membangun suatu infrastruktur publik untuk menghindari terjadinya proyek mangkrak di tengah jalan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu memperhatikan, menjaga, dan mengelola fasilitas publik dengan baik, sehingga kualitas fasilitas dan pelayanan publik semakin baik. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mencari data yang terbaru yaitu tahun 2014.

## REFERENSI

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Balitbangda Provinsi NTT. 2008. Analisis Tentang Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Litbang NTT*, 4(3), h: 177-192.
- Bati. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Utara). *Tesis* Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- BPS. 2012. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Bali*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3<sup>rd</sup> National Conference UKWMS Surabaya*.
- Fauzyny, Wulan. 2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Harahap, Riva Ubar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Tesis* Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360.
- Jumadi, M. Pudjiharjo, Ghozali Maski, Moh. Khusaini. The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java. *IOSR Journal Of Humanities and Social Science*. Vol. 13, Issue 1, pp: 01-07.
- Lugastoro, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2), h: 01-19.
- Martini, Kadek. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.
- Rindayati, Wiwiek. 2009. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Disertasi* Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian, Bogor.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), h: 103-124.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Pretasi* . Juni 2012, 9(1), h: 113-133

- Smoke, P. 2001. Fiscal Decentralization in Developing Countries : A Review of Current Concepts and Practice. United Nation Research Institute for Social Development. [www.worldbank.org/decentralization](http://www.worldbank.org/decentralization). Diunduh 31 Agustus 2014.
- Tiebout, Charles M. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), pp: 416-424.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman, Syaikh., M. Sulton Mawardi., Adri Poesoro., Asep Suryahadi., Charles Sampford. 2008. Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Laporan Penelitian SMERU. [www.smeru.or.id/report/research/dak/dak\\_ind.pdf](http://www.smeru.or.id/report/research/dak/dak_ind.pdf). Diunduh 31 Agustus 2014.
- Yudhaningsih, Resi. 2010. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Regional di Indonesia. *Teknis*, 5(1), h: 46-52.
- Yusuf, Ahmad. 2014. Pengaruh Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Perkembangan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. Paper. <https://stan.academia.edu/AhmadYusuf>. Diunduh 31 Agustus 2014.